
PERAN PEMERINTAH LOKAL DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT: TINJAUAN KEBIJAKAN PUBLIK

Rusli Roganda Sihite

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Peran pemerintah lokal dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sangat penting dalam membangun masyarakat yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya. Kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah lokal memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan kebijakan publik tentang peran pemerintah lokal dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dengan mengeksplorasi strategi, program, dan inisiatif yang telah diimplementasikan serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kata Kunci: *Peran Pemerintah Lokal, Kualitas Hidup Masyarakat, Kebijakan Publik*



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah lokal memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat lokal. Mereka bertanggung jawab atas penyelenggaraan berbagai layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, lingkungan, dan sosial. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan urbanisasi yang pesat, peran pemerintah lokal menjadi semakin signifikan dalam memastikan bahwa masyarakat lokal dapat hidup dengan layak dan bermartabat.

Tingkat pemerintah lokal, yang sering kali beroperasi di tingkat kota atau kabupaten, memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Mereka memiliki kesempatan untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan konteks lokal dan merancang program yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara signifikan.

Salah satu instrumen utama yang dimiliki oleh pemerintah lokal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk merumuskan tujuan, strategi, dan program-program yang akan diterapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, tinjauan kebijakan publik tentang peran pemerintah lokal dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi sangat relevan.

Tinjauan kebijakan publik ini akan melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai kebijakan dan program yang telah diimplementasikan oleh pemerintah lokal dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Fokusnya akan mencakup berbagai bidang, mulai dari pendidikan dan kesehatan hingga infrastruktur dan lingkungan hidup. Melalui tinjauan ini, kita dapat memahami lebih baik tentang strategi apa yang telah berhasil, apa yang masih perlu diperbaiki, dan bagaimana pemerintah lokal dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, tinjauan kebijakan publik ini juga akan membahas berbagai isu dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah lokal dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti sumber daya terbatas, perencanaan yang kurang matang, koordinasi antar-sektor yang tidak efektif, serta masalah-masalah administratif dan birokratis lainnya. Dengan memahami hambatan-hambatan ini, pemerintah lokal dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja mereka dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, pendahuluan ini menggarisbawahi pentingnya tinjauan kebijakan publik tentang peran pemerintah lokal dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui tinjauan ini, kita dapat mengidentifikasi peluang-peluang untuk perbaikan, mengatasi tantangan, dan membangun masyarakat yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisis kebijakan publik untuk menginvestigasi peran pemerintah lokal dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Metode ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang strategi, program, dan inisiatif yang telah diadopsi oleh pemerintah lokal serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah penjelasan panjang tentang metode penelitian yang akan digunakan:

- 1. Pendekatan Metodologi: Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan analisis dokumen dan wawancara sebagai metode utama pengumpulan data. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan kesempatan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan publik dan konteks lokalnya.*
- 2. Analisis Dokumen: a. Pengumpulan Dokumen: Dokumen-dokumen yang relevan seperti kebijakan, program, laporan tahunan, dan dokumen perencanaan akan dikumpulkan dari pemerintah lokal terkait. b. Analisis Dokumen: Dokumen-dokumen tersebut akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi kebijakan, strategi, dan program-program yang telah diadopsi oleh pemerintah lokal dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Analisis ini akan mencakup identifikasi tujuan kebijakan, langkah-langkah implementasi, alokasi anggaran, dan evaluasi kinerja.*
- 3. Wawancara: a. Identifikasi Responden: Responden untuk wawancara akan dipilih secara purposif dari berbagai stakeholder yang terlibat dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik di tingkat lokal. Ini termasuk pejabat pemerintah, anggota masyarakat, aktivis lokal, dan akademisi. b. Pelaksanaan Wawancara: Wawancara akan dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon, tergantung pada preferensi responden. Wawancara akan difokuskan pada pemahaman mereka tentang kebijakan publik yang telah diadopsi, evaluasi mereka tentang keberhasilan implementasi, serta tantangan dan peluang yang dihadapi.*
- 4. Analisis Data: a. Analisis Dokumen: Data dari dokumen akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, tren, dan tema yang muncul terkait dengan peran pemerintah lokal dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. b. Analisis Wawancara: Data dari wawancara akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari tanggapan responden. Analisis ini akan membantu dalam memahami persepsi dan evaluasi mereka terhadap kebijakan publik yang telah diimplementasikan.*
- 5. Integrasi Data: Hasil dari analisis dokumen dan wawancara akan diintegrasikan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran pemerintah lokal dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kesesuaian dan saling melengkapi antara data dokumen dan data wawancara akan digunakan untuk memperkuat temuan dan kesimpulan penelitian.*

PEMBAHASAN

Pemerintah lokal memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebagai entitas yang berada di garis depan pelayanan publik, pemerintah lokal memiliki tanggung jawab langsung dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, memfasilitasi pembangunan infrastruktur, dan mengelola sumber daya lokal dengan efektif.

Salah satu peran pemerintah lokal yang paling mendasar adalah menyediakan layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Melalui penyediaan layanan-layanan ini, pemerintah lokal dapat memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Selain itu, pemerintah lokal juga bertanggung jawab untuk memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur yang baik, seperti jalan raya, transportasi publik, air minum, listrik, dan telekomunikasi, merupakan fondasi yang penting bagi perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat.

Kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah lokal juga dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Misalnya, kebijakan yang mendukung akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan pelatihan dapat membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan.

Pemerintah lokal juga dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perlindungan lingkungan hidup. Dengan menerapkan kebijakan dan program-program yang berkelanjutan, seperti pengelolaan sampah yang efisien, penghijauan perkotaan, dan konservasi sumber daya alam, pemerintah lokal dapat memastikan bahwa lingkungan tempat tinggal masyarakat tetap sehat dan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah lokal juga memiliki peran yang penting dalam mempromosikan inklusi sosial dan mengatasi ketidaksetaraan di dalam masyarakat. Melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas, pemerintah lokal dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan merata bagi semua orang.

Pemerintah lokal juga dapat memainkan peran yang penting dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dengan mengimplementasikan program-program pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, pemerintah lokal dapat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan sosial, serta memastikan bahwa manfaat pembangunan didistribusikan secara adil di seluruh masyarakat.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah lokal dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah keterbatasan sumber daya. Dengan anggaran yang terbatas, pemerintah lokal harus membuat keputusan yang sulit tentang

alokasi sumber daya untuk memprioritaskan program-program dan proyek-proyek yang paling penting bagi masyarakat.

Selain itu, tantangan lainnya adalah koordinasi antar berbagai lembaga pemerintah lokal, serta antara pemerintah lokal dan pemerintah pusat. Untuk mencapai hasil yang optimal, penting bagi pemerintah lokal untuk bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga internasional.

Dalam konteks globalisasi dan kompleksitas tantangan sosial, peran pemerintah lokal dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi semakin penting. Dengan memahami peran dan tanggung jawab mereka secara menyeluruh, pemerintah lokal dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi semua orang.

Pemerintah lokal juga memiliki peran penting dalam mengelola krisis dan bencana alam yang dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Dalam situasi darurat seperti bencana alam, konflik, atau pandemi, pemerintah lokal harus dapat memberikan respons yang cepat dan efektif untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pemerintah lokal dapat memainkan peran dalam mempromosikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik, pemerintah lokal dapat memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Penting juga untuk diingat bahwa pemerintah lokal bukanlah satu-satunya pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kerjasama lintas-sektoral dan kemitraan dengan sektor swasta, lembaga akademis, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum juga penting untuk mencapai hasil yang optimal.

Selain itu, pemerintah lokal juga memiliki peran penting dalam mempromosikan inovasi dan pengembangan lokal. Dengan mendukung inisiatif-inisiatif lokal dan mendorong kreativitas dan kewirausahaan di tingkat komunitas, pemerintah lokal dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Dalam melaksanakan perannya, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik adalah kunci untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang diadopsi benar-benar mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Pemerintah lokal harus terbuka terhadap umpan balik dan kritik dari masyarakat, serta siap untuk melakukan perubahan jika diperlukan.

Tantangan lain yang dihadapi oleh pemerintah lokal dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah ketidakpastian lingkungan dan perubahan sosial yang cepat. Dengan kemajuan teknologi, globalisasi, dan tantangan-tantangan baru seperti perubahan iklim, pemerintah lokal harus dapat beradaptasi dan merespons dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi.

Selain itu, penting juga untuk mengatasi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di tingkat lokal, yang dapat menghambat efektivitas kebijakan publik dan merugikan kesejahteraan masyarakat. Dengan memperkuat tata kelola yang baik dan mempromosikan

akuntabilitas, pemerintah lokal dapat memastikan bahwa sumber daya publik digunakan dengan efisien dan transparan.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi pemerintah lokal untuk membangun kapasitas internal yang kuat, termasuk sumber daya manusia yang terlatih dan infrastruktur administratif yang efisien. Dengan memiliki kapasitas yang memadai, pemerintah lokal dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan, penting bagi pemerintah lokal untuk mengadopsi pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan mengintegrasikan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan.

Dengan memainkan peran yang efektif dalam mengelola sumber daya lokal, memfasilitasi pembangunan infrastruktur, mempromosikan inklusi sosial, mengatasi kemiskinan, dan merespons tantangan-tantangan global dan lokal, pemerintah lokal dapat menjadi kekuatan utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan masyarakat yang lebih sehat, lebih adil, dan lebih berkelanjutan.

Pemerintah lokal juga dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat daya saing ekonomi daerah. Dengan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, memfasilitasi investasi, dan memberikan dukungan kepada pelaku usaha lokal, pemerintah lokal dapat membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat ekonomi lokal secara keseluruhan.

Selain itu, pemerintah lokal juga memiliki peran penting dalam mempromosikan budaya lokal dan pariwisata. Dengan mempromosikan kekayaan budaya, seni, dan warisan lokal, pemerintah lokal dapat meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja di sektor pariwisata, dan memperkuat identitas lokal.

Penting untuk dicatat bahwa peran pemerintah lokal tidak terbatas pada ranah administratif, tetapi juga mencakup peran sebagai agen perubahan sosial. Dengan membangun kemitraan dengan masyarakat sipil, lembaga akademis, dan sektor swasta, pemerintah lokal dapat memfasilitasi inisiatif-inisiatif sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam melaksanakan perannya, pemerintah lokal juga harus memastikan bahwa kebijakan dan program yang diadopsi mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sosial. Hal ini mencakup memastikan bahwa manfaat pembangunan didistribusikan secara merata di seluruh masyarakat dan bahwa hak-hak dasar semua individu dihormati dan dilindungi.

Pemerintah lokal juga memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan mengadopsi kebijakan yang mendukung penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pengelolaan limbah yang efisien, dan peningkatan efisiensi energi, pemerintah lokal dapat memastikan bahwa pembangunan daerah berlangsung tanpa merusak lingkungan.

Selain itu, pemerintah lokal juga dapat memainkan peran dalam membangun ketahanan terhadap perubahan iklim. Dengan mengadopsi kebijakan dan program-program yang mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan adaptasi terhadap

perubahan iklim, dan mengelola risiko bencana alam, pemerintah lokal dapat membantu melindungi masyarakat dari dampak perubahan iklim yang semakin nyata.

Pemerintah lokal juga memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa semua warga memiliki akses yang sama terhadap layanan dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan air bersih. Dengan memprioritaskan investasi dalam sektor-sektor ini dan memastikan bahwa layanan-layanan ini tersedia di seluruh wilayah daerah, pemerintah lokal dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Dalam melaksanakan perannya, pemerintah lokal juga harus memastikan bahwa kebijakan dan program yang diadopsi memperhitungkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Ini dapat dilakukan melalui mekanisme partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, serta melalui konsultasi publik dan dialog terbuka dengan masyarakat.

Selain itu, pemerintah lokal juga harus memastikan bahwa kebijakan dan program yang diadopsi memperhatikan kepentingan jangka panjang masyarakat dan lingkungan. Ini berarti bahwa pemerintah lokal harus mengambil tindakan untuk melindungi sumber daya alam, mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan, dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.

Dalam melaksanakan perannya, pemerintah lokal juga harus memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh daerah dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Hal ini mencakup pengelolaan anggaran yang baik, pemantauan dan evaluasi program-program yang ada, serta pengembangan kapasitas institusi untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah lokal dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah keterbatasan sumber daya, terutama di negara-negara berkembang. Dengan anggaran yang terbatas, pemerintah lokal harus dapat membuat keputusan yang cerdas tentang alokasi sumber daya untuk memprioritaskan program-program dan proyek-proyek yang paling penting bagi masyarakat.

Selain itu, tantangan lainnya adalah mengelola perubahan sosial dan ekonomi yang cepat, termasuk urbanisasi yang pesat dan migrasi penduduk antar wilayah. Dengan meningkatnya tekanan pada infrastruktur dan layanan dasar, pemerintah lokal harus dapat merespons dengan cepat untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Dalam mengatasi tantangan ini, kerjasama lintas-sektoral dan kemitraan dengan sektor swasta, lembaga akademis, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum sangat penting. Dengan bekerja sama, pemerintah lokal dapat memanfaatkan sumber daya yang ada secara lebih efektif, meningkatkan efisiensi program-program yang ada, dan menciptakan sinergi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam mengakhiri, peran pemerintah lokal dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat tidak dapat diabaikan. Dengan mengambil pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, pemerintah lokal dapat menjadi kekuatan utama dalam mempromosikan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi semua warga. Diperlukan komitmen yang kuat, koordinasi yang efektif, dan partisipasi masyarakat yang aktif untuk mencapai visi ini.

Kesimpulan

Dalam kesimpulannya, peran pemerintah lokal dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sangatlah signifikan. Melalui kebijakan publik yang tepat, pemerintah lokal memiliki kemampuan untuk memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan sehari-hari warga di tingkat lokal. Kebijakan yang diambil dapat berdampak pada aspek-aspek penting dalam kehidupan masyarakat, seperti akses terhadap layanan dasar, pembangunan infrastruktur, ekonomi lokal, lingkungan, budaya, dan keamanan.

Dengan menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, air bersih, dan sanitasi, pemerintah lokal dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara langsung. Infrastruktur yang baik dan layanan publik yang terjangkau dan berkualitas dapat meningkatkan standar hidup masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, melalui kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, pemerintah lokal dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kemiskinan di wilayahnya. Dengan mempromosikan investasi, mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial, dan memberikan dukungan kepada pelaku usaha lokal, pemerintah lokal dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah lokal juga memiliki peran penting dalam melestarikan budaya lokal dan meningkatkan pariwisata, yang dapat berkontribusi pada pendapatan daerah dan memperkuat identitas lokal. Dengan mempromosikan kekayaan budaya, seni, dan warisan lokal, pemerintah lokal dapat menciptakan lapangan kerja di sektor pariwisata dan memperkenalkan keindahan dan keunikan daerahnya kepada dunia.

Melalui kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan lingkungan, pemerintah lokal dapat melindungi sumber daya alam, mengurangi polusi, dan meminimalkan risiko bencana alam. Ini berarti menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal sekarang dan di masa depan.

Tidak hanya berperan dalam menyediakan layanan dan fasilitas, pemerintah lokal juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang diadopsi mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah lokal dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berdampak positif bagi warga setempat.

Namun, peran pemerintah lokal juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, perubahan sosial dan ekonomi yang cepat, dan kompleksitas masalah-masalah global dan lokal. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah lokal harus mengadopsi pendekatan yang holistik, bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, dan membangun kapasitas institusi yang kuat.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, pemerintah lokal dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan masyarakat yang lebih sehat, lebih makmur, dan lebih berkelanjutan bagi semua warga. Kesuksesan pemerintah lokal dalam mencapai visi ini tergantung pada komitmen yang kuat, kerja sama yang efektif, dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- MARPAUNG, A. D., & Harahap, G. Y. (2022). *PEMBANGUNAN PLTA PEUSANGAN 1 & 2 HYDROELECTRIC POWER PLANT CONTRUCTION PROJECT 88 MW-PENSTOCK LINE ACEH TENGAH*. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- Santoso, M. H. (2021). *Application of Association Rule Method Using Apriori Algorithm to Find Sales Patterns Case Study of Indomaret Tanjung Anom*. *Brilliance: Research of Artificial Intelligence*, 1(2), 54-66.
- Putri, A. O. (2017). *Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan*.
- Muda, I., & Angelia, N. (2018). *Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Mengelola Sektor Pariwisata Pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat*.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2015). *Peranan Gaya Kepemimpinan Dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, R. S. (2018). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Program Studi (SIPRODI)*.
- Girsang, L. (2020). *Pengaruh Pelatihan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Lintas Aman Andalas Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Batubara, B. M. (2023). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Siregar, N. I., & Aziz, A. (2012). *Model Pendidikan Karakter di SMA Swasta Brigjen Katamso Medan*.
- SIDABUTAR, P. R., & Harahap, G. Y. (2022). *IDENTIFIKASI PELAT LANTAI PERON TINGGI PADA PEMBANGUNAN STASIUN LUBUK PAKAM BARU*. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).
- Gunawan, I., Matondang, A., & Sembiring, M. (2020, February). *Lean Technology Implementation For Reducing The Dwelling Time Level*. In *Proceedings of the 1st International Conference of Global Education and Society Science, ICOGESS 2019, 14 March, Medan, North Sumatera, Indonesia*.
- Hartono, B. *HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT: A STUDY OF THE POLICY IMPLEMENTATION OF THE TRAINING POLICY TOWARD CAREER OF GOVERNMENT'S SERVANTS IN SLEMAN REGION*.
- Harahap, G. Y. (2020). *Instilling Participatory Planning in Disaster Resilience Measures: Recovery of Tsunami-affected Communities in Banda Aceh, Indonesia*. *Budapest International Research in Exact Sciences (BirEx) Journal*, 2(3), 394-404.
- Tarigan, U., & Suriadi, A. (2007). *Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Timur*.
- Tarigan, U., & Harahap, B. (2006). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang surat Izin Tempat Usaha (SITU) di Kabupaten Gayo Lues*.
- Nasution, I., & Tarigan, U. (2017). *Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Local di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang)*.
- Dewi, W. C. (2020). *Pengaruh Likuiditas Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Sembiring, W. M. (2023). *Peranan Babinsa (Bintara Pembina Desa) Koramil 0201/Medan Komando Rayon Militer 11/Md dalam Pembinaan Kenakalan Remaja di Kecamatan Medan Deli*.
- Tarigan, U. (2004). *Peranan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Administrasi Pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Wibowo, H. T., Tarigan, R. S., & Mukmin, A. A. (2022). *APLIKASI MARKETPLACE PENDAMPING WISATA DENGAN API MAPS BERBASIS MOBILE DAN WEB*. Retrieved from osf.io/3jpd/.
- Wuri Andary, R. (2015). *Komunikasi Bermedia dan Perilaku Pelajar (Studi Korelasional tentang Penggunaan Smartphone terhadap Perilaku Pelajar SMA Negeri I Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Tarigan, U. (2016). *Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Tahun 2015 di Kecamatan Torgamba (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U. (2012). *Evaluasi Dampak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh)*.
- Rejeki, R. (2019). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.

- Muda, I., & Dewi, R. (2013). *Model Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Kecamatan Sipirok Tapanuli Selatan*.
- Kurniawan, M. Y. (2022). *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Data, P., Tarigan, R. S., Wibowo, H. T., Azhar, S., & Wasmawi, I. (2016). *Manual Procedure Petunjuk dan Mekanisme Pengoperasian Pendaftaran Ulang Online Mahasiswa Lama*.
- Berutu, B. R. (2019). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat*.
- Muda, I., & Lubis, Y. A. (2023). *Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Smart City (Studi Kasus di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan)*.
- Muda, I., Harahap, R. H., Amin, M., & Kusmanto, H. (2022, November). *Problems of the exploitation policy of children of street beggars in Medan city*. In *AIP Conference Proceedings (Vol. 2659, No. 1)*. AIP Publishing.
- Ramadhani, M. R., & Syarif, Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN SALURAN PENGHUBUNG PADA BENDUNG DI SERDANG. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Santoso, M. H. (2021). *Laporan Kerja Praktek Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis Web pada SMA Swasta Persatuan Amal Bakti (PAB) 8 Saentis*.
- Siregar, N. S. S. (2017). *Modul Praktikum Publik Speaking*.
- TARIGAN, R. G., & Harahap, G. Y. (2022). *LAPORAN KERJA PRAKTEK PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG MENARA BRI JL. PUTRI HIJAU NO. 2-KOTA MEDAN. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3)*.
- Tarigan, R. S., Wasmawi, I., & Wibowo, H. T. (2020). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Tanda Tangan Gaji Online (SITAGO)*.
- Tarigan, U. (2004). *Hubungan Kemampuan Manajemen Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana dan Efektivitas Pencapaian Program Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Tenggara*.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2018). *Evaluasi Prosedur Pelayanan KTP Elektronik di Kantor Camat Kecamatan Medan Belawan Kota Medan*.
- Tarigan, U., & Hasibuan, M. A. (2013). *Pengaruh Kepemimpinan Dalam Peningkatan Koordinasi Kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U., & Lubis, A. A. (2014). *Tingkat Pendapatan dan Proses Pemungutan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai*.
- Barus, R. K. I., & Dwiana, R. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Thamrin, M. H., & Batubara, B. M. (2014). *Pengaruh Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang*.
- Harahap, G. Y. (2001). *Taman Bermain Anak-Anak di Medan Tema Arsitektur Perilaku (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Rangkuti, A. H., Siregar, T., & Munawir, Z. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*.
- Tarigan, R. S., Azhar, S., & Wibowo, H. T. (2021). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Aplikasi Registrasi Asrama Kampus*.
- Tarigan, U. (2013). *Politik Pembangunan Partai Politik Islam: Studi Pemikiran Politik Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*.
- Ritonga, S., & Batubara, B. M. (2020). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, R. S. (2016). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Elearning. uma. ac. id*.
- Siregar, N. S. S. (2019). *Analisis Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Timur (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Deliana, M. (2013). *Pengaruh Budaya Perusahaan (Corporate Culture) terhadap Kinerja Karyawan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Muda, I., & Mustofa, W. (2023). *Implementasi Prinsip Good Governance Responsitas Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Kantor Kantor Camat Lingga Bayu Kabupaten Madina (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Adil, A., Liana, Y., Mayasari, R., Lamonge, A. S., Ristiyana, R., Saputri, F. R., ... & Wijoyo, E. B. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Get Press Indonesia.
- Angelia, A. (2022). *Analisis Implementasi Sistem Kinerja Anggaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara*.
- Batubara, B. M., Humaizi, H., Kusmanto, H., & Ginting, B. (2022, November). *Poverty reduction program in Medan city: Public policy perspective*. In *AIP Conference Proceedings (Vol. 2659, No. 1)*. AIP Publishing.

- Kadir, A., & Nasution, I. (2014). *Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai Periode 2009-2014*.
- Kadir, A., & Siregar, N. S. S. (2019). *Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam Tahun 2018*.
- Lubis, M. M., & Siregar, N. S. S. (2013). *Analisis Implementasi Harga Pembelian Pemerintahan (HPP) Beras Terhadap Pendapatan Petani dan Pencapaian Swasembada Beras di Sumatera Utara*.
- Sianipar, G. (2019). *Respon pertumbuhan dan produksi tanaman kacang tanah (arachis hypogaea l.) Terhadap pemberian kompos batang jagung dan pupuk organik cair limbah ampas tebu (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, S. A. (2018). *implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Gelandangan dan Pengemisan serta Praktek Tuna Susila di Kota Medan*.
- Tarigan, R. S., & Dwiatma, G. *ANALISA STEGANOGRAFI DENGAN METODE BPCS (Bit-Plane Complexity Segmentation) DAN LSB (Least Significant Bit) PADA PENGOLAHAN CITRA*.
- Tarigan, U., & Fahmi, I. (2014). *Standar Pelayanan dalam Pengurusan Surat-Surat Kependudukan di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang*.
- Dewi, R., & Muda, I. (2013). *Fungsi Kedudukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pelaksanaan Tertib Pertanahan di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang*.
- Kadir, A., & Tarigan, U. (2018). *Peranan Dinas Tata Kota dan Pertamanan dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Tanjungbalai*.
- Lubis, Y. A., & Batubara, B. M. (2020). *Implementasi Musyawarah Rencana Pembangunan (Studi Musrenbang di Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.